

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung gugat pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny atas robohnya bangunan pondok pesantren terhadap korban dalam perspektif hukum perdata. Permasalahan ini penting karena pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat tinggal dan ruang sosial santri yang menuntut jaminan keselamatan bangunan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Pesantren, serta peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan laporan berita kredibel mengenai peristiwa robohnya bangunan Al Khoziny. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola pondok pesantren dapat dimintai tanggung gugat apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian pengelolaan bangunan dan kerugian korban. Akibat hukum yang dapat timbul meliputi kewajiban ganti rugi, pemulihan kerugian korban, evaluasi kepatuhan administratif, serta kemungkinan konsekuensi hukum lain sesuai hasil pembuktian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan kelayakan bangunan dan pemenuhan standar keselamatan di lingkungan pesantren.

Kata kunci: bangunan gedung; kelalaian; pondok pesantren; tanggung gugat; perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

This study examines the civil liability of the managers of Al Khoziny Islamic Boarding School following the collapse of a pesantren building that caused losses to victims. The issue is important because an Islamic boarding school is not only an educational institution but also a residence and social environment for students, requiring a safe and feasible building system. This research applies normative legal method with statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include the Indonesian Civil Code, the Building Law, the Pesantren Law, and regulations on building administration and safety. Secondary legal materials are drawn from books, scholarly articles, and credible reports on the Al Khoziny building-collapse incident. The findings show that pesantren managers may be held civilly liable if the elements of unlawful act, fault or negligence, loss, and causal relationship between building-management negligence and victims' losses are fulfilled. The legal consequences may include compensation, restoration of victims' losses, administrative-compliance evaluation, and other legal consequences depending on evidence. This study emphasizes the importance of building-feasibility supervision and safety-standard compliance in pesantren environments.

Keywords: building; civil liability; negligence; pesantren; unlawful act.